


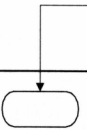




	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>	Nomor SOP	: 056/SOP/ITJEN/12/2019
		Tgl. Disahkan	: 26 DESEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas</p>  <p>Ir. SUGIHARDJO, M.Si Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001</p> </div> <div style="margin-left: 10px;">  </div> </div>
"Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Peraturan"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi Peraturan dan/atau Keputusan secara berkala; 2. Melakukan pembahasan bersama. 	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal 2. SOP Penyusunan Produk Hukum yang ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat tulis kantor; 4. Map Takah; 5. Peraturan-peraturan terkait konsep peraturan yang disusun. 	
Peringatan :			
Keterlambatan evaluasi peraturan dan/atau keputusan akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.			

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>	Nomor SOP	: 056/SOP/ITJEN/12/2019
		Tgl. Disahkan	: 26 DESEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  Ir. SUGIHARDJO, M.Si Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001
"Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Peraturan"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi Peraturan dan/atau Keputusan secara berkala; 2. Melakukan pembahasan bersama. 	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal 2. SOP Penyusunan Produk Hukum yang ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat tulis kantor; 4. Map Takah; 5. Peraturan-peraturan terkait konsep peraturan yang disusun. 	
Peringatan :			
Keterlambatan evaluasi peraturan dan/atau keputusan akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur dan Para Kepala Bagian	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Hukum	Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
											
9.	Memeriksa dan menandatangani Konsep Laporan Hasil Evaluasi							1. Konsep Laporan Hasil Evaluasi 2. Lembar Catatan	1 hari	1. Laporan Hasil Evaluasi 2. Lembar Catatan	
10.	Menerima Laporan Hasil Evaluasi							1. Laporan Hasil Evaluasi 2. Lembar Catatan	1 hari	Laporan Hasil Evaluasi	Hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan penyusunan produk hukum mengacu: a. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengawasan; atau b. SOP Penyusunan Produk Hukum yang ditandatangani Irjen.